



LKjIP TAHUN 2024



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	3
1.3 Isu-isu Strategis.....	11
1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran.....	15
1.5 Sistematika Penulisan.....	21
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	26
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	29
2.3 Perjanjian Kinerja	31
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	36
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	36
3.2 Realisasi Anggaran	42
3.3 Inovasi	53
BAB IV PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Rekomendasi	58
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja	
RKT	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3.1 : Rumusan Permasalahan	12
Tabel 1.4.1.1 : Jumlah Pegawai	15
Tabel 1.4.2.1 : Jumlah Sarana dan Prasarana.....	16
Tabel 1.4.3.1 : Anggaran.....	20
Tabel 1.6.1 : TLLHE SAKIP 2023	22
Tabel 2.1.1 : Tujuan Sasaran Perangkat Daerah.....	28
Tabel 2.2.1 : Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.....	30
Tabel 2.2.2 : Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	30
Tabel 2.3.1 : Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.....	31
Tabel 2.3.2 : Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024.....	32
Tabel 3.1.1 : Capaian Kinerja Tahun 2024	37
Tabel 3.1.2 : Membandingkan antara target dan realisasi kinerja.....	38
Tabel 3.1.3 : Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja	40
Tabel 3.1.4 : Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini ...	41
Tabel 3.1.5 : Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan	43
Tabel 3.1.6 : Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	45
Tabel 3.1.7 : Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan	47
Tabel 3.2.1 : Realisasi anggaran yang digunakan	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2.1	: Peta Proses Bisnis Level 0	4
Gambar 1.2.2	: Peta Proses Bisnis Level 1	5
Gambar 1.2.3	: Bagan Organisasi.....	7

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Tahun 2024. LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal yang telah disusun merupakan kerja keras seluruh komponen yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran serta dalam upaya peningkatan pembangunan. Proses kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP sebagai bagian proses manajemen pemerintah daerah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Tahun 2024 dan sebagai sumber informasi yang berguna untuk pelaksanaan kegiatan Pemerintah dan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.



Kendal, Januari 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kendal

Drs. BAMBANG DJOKO PITONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19690323 199003 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal adalah salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Kendal yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas mengupayakan secara maksimal perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan keteriban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana keamanan dan ketertiban, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah sesuai dengan rasa keadilan dan dinamika masyarakat serta pengembangan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan HAM.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, Satpol PP dan Damkar dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah. Satpol PP dan Damkar mempunyai tugas pokok Membantu Bupati melaksanakan sub urusan pemerintahan dibidang Ketentraman, Ketertiban umum, dan kebakaran yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Sedangkan menurut Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal, diuraikan sebagai berikut :

1) Kedudukan Satpol PP dan Damkar

- a. Satpol PP dan Damkar merupakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.
- b. Satpol PP dan Damkar dipimpin oleh Kepala Satpol PP dan Damkar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2) Tugas Satpol PP dan Damkar

- a. Membantu Bupati melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

3) Fungsi Satpol PP dan Damkar

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;

- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;
- f. Pelaksanaan administrasi Satpol PP dan Damkar di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran

1.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis adalah merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

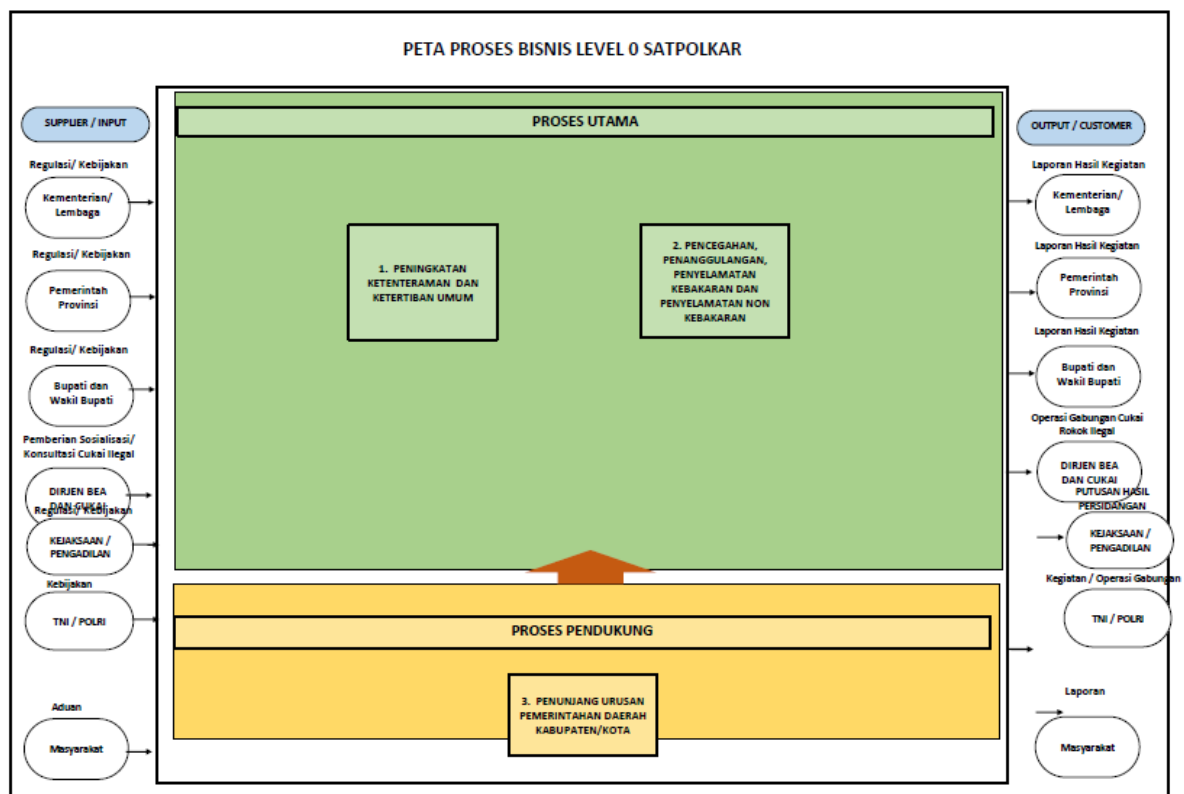
Peta proses bisnis pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal dimaksudkan mengarahkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Peta proses bisnis bertujuan agar perangkat daerah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun

eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah perangkat daerah, memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah sebagai dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan penilaian kinerja.

Adapun mandat kinerja peta proses bisnis pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal tergambarakan sebagaimana dalam gambar berikut ini :

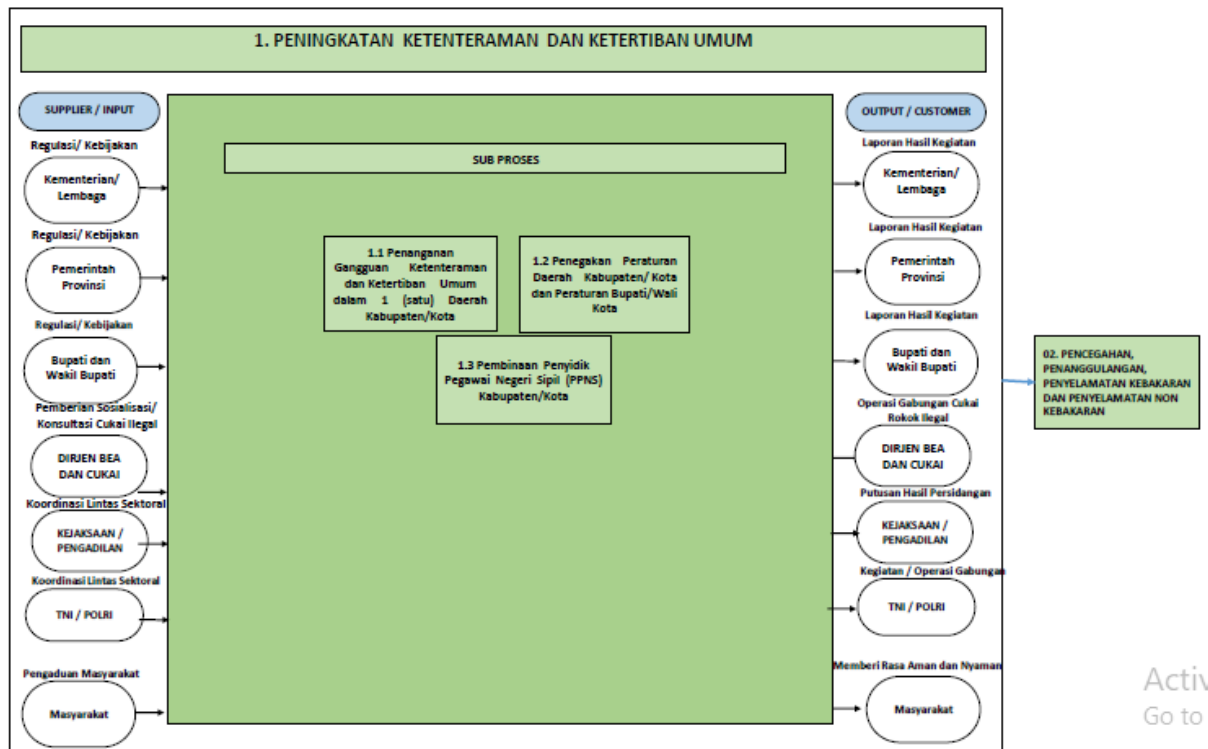
Gambar 1.2.1



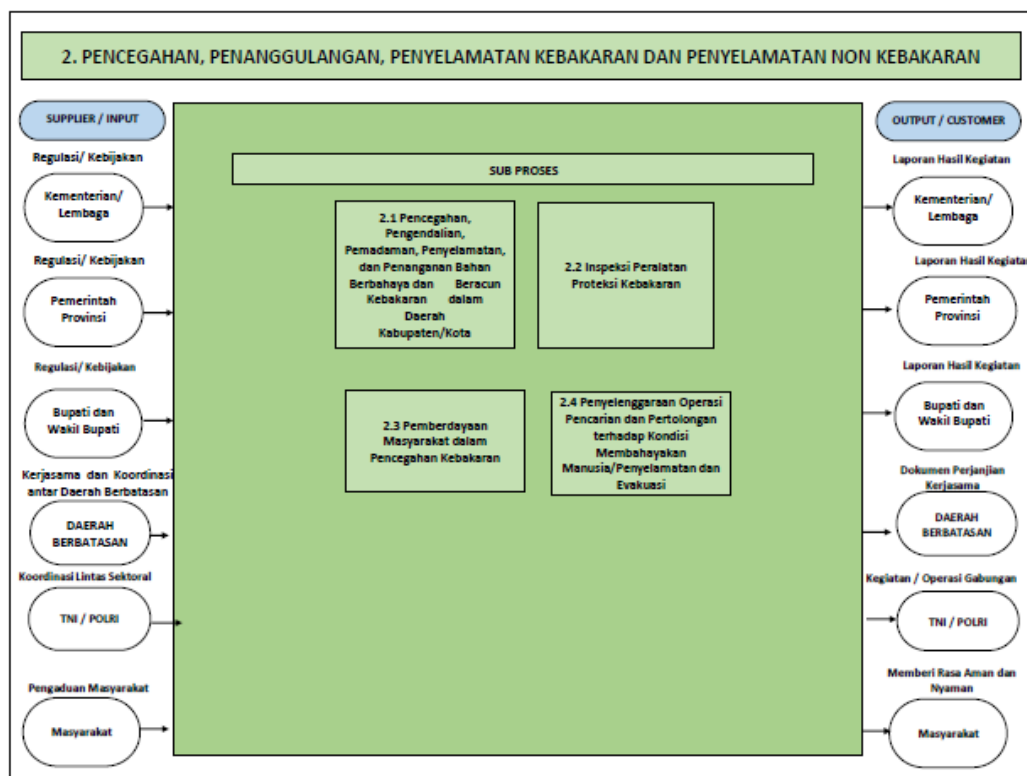
Peta Proses Bisnis Level 0 (Peta Proses) ini merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung.

Gambar 1.2.2

PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 / SUB PROSES MAP
1. PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM



PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 / SUB PROSES MAP
2. PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN



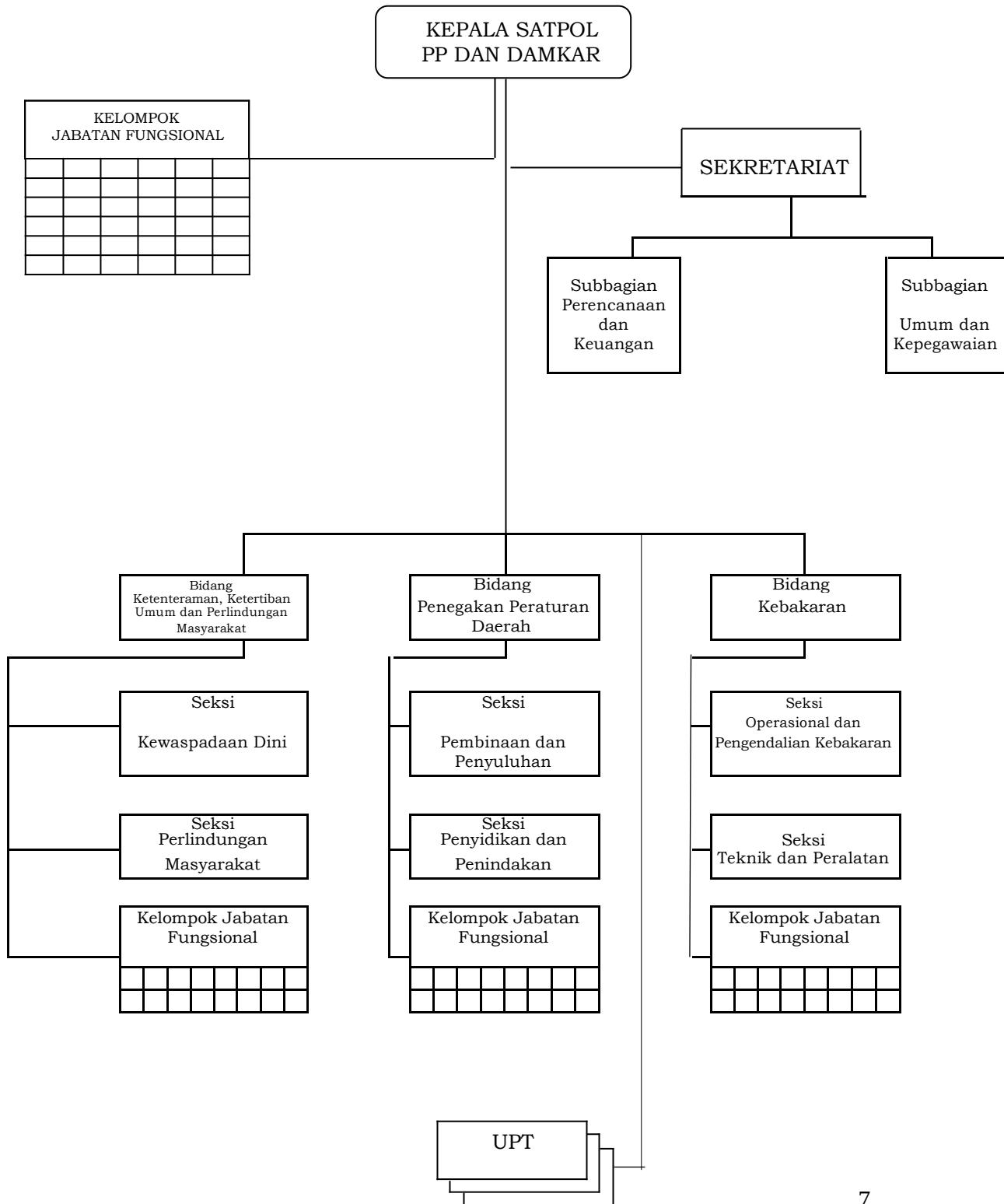
PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 / SUB PROSES MAP
3. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



Peta Proses Bisnis Level 1 (Peta Sub Proses) ini merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.

Gambar 1.2.3

**BAGAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KENDAL**



Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal dipimpin oleh Kepala Satuan yang mempunyai rincian tugas sebagai berikut ;

1. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Satpol PP dan Damkar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
4. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
5. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
6. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Satpol PP dan Damkar mencapai target yang telah ditetapkan;
7. Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;

8. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
9. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;
10. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Bupati yang mempunyai sanksi hukum kepada aparatur, badan hukum atau masyarakat agar tercipta kemanfaatan dan kepastian hukum di Daerah;
11. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pengembangan kelembagaan Satpol PP dan Damkar, penyiapan anggota, pembinaan mental dan fisik serta diklat peningkatan kemampuan bagi anggota Satpol PP dan Damkar dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
12. Mengarahkan dan mengendalikan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat guna terciptanya kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
13. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pembinaan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan anggota

Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

14. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pencegahan, pelaksanaan, dan pemeliharaan sarana prasarana bidang kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
15. Melaksanakan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
16. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan kebakaran agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
17. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Satpol PP dan Damkar dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
18. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
19. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
20. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

21. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

1.3. Isu-isu Strategis

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang dilandasi prinsip keselarasan merupakan salah satu ciri dari system demokrasi yang hidup dan berkembang dengan baik. Pengambilan keputusan yang demokratis mengisyaratkan bahwa suatu kebijakan harus melibatkan masyarakat dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Perkembangan teknologi dan iklim keterbukaan informasi publik yang semakin cepat, menjadikan setiap perangkat daerah harus dapat bersikap transparan dan professional selaras dengan perubahan yang terjadi.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara tujuan pembangunan yang akan dicapai dengan kondisi riil pada saat perencanaan pembangunan dibuat. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan daerah. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi obyektif daerah dan kesepakatan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, maka akan diketahui permasalahan utama Kabupaten Kendal. Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kendal tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 (tiga) pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah daerah

3. Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Ada 4 (empat) permasalahan dan isu-isu Strategis Daerah. Dalam Permasalahan Pembangunan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar :

1. Belum optimalnya penegakkan peraturan/kebijakan pemerintah daerah, tahun 2020 sebesar 90%,
2. Belum optimalnya pelayanan dasar sebagaimana yang tertulis pada SPM bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat,
3. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) baru sebesar 95% pada tahun 2020,
4. Belum semua wilayah rawan bencana menjadi desa/kelurahan tangguh bencana tahun 2020 baru sebesar 10,96% desa risiko tinggi.

Urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan Stuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.3.1

Rumusan Permasalahan : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

NO	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik	Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar
		Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik
		Belum optimalnya budaya kerja aparatur

2.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah daerah	Belum optimalnya sistem manajemen SDM aparatur
		Belum optimalnya kinerja dan ketatalaksanaan OPD
		Belum optimalnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah
		Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan dan asset daerah
		Belum optimalnya system integrasi perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengelolaan keuangan dan asset daerah
		Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
		Belum optimalnya tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan
3.	Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat
		Belum optimalnya pelayanan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran
		Belum optimalnya ketersediaan Sarana prasarana penunjang kinerja baik secara kualitas dan kuantitas
		Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur dalam melaksanakan Tupoksi
		Belum optimalnya upaya pencegahan pelanggaran Perda baik yang non yustisi dan Pro yustisi
		Masih terbatasnya tingkat pembinaan linmas
		Belum optimalnya koordinasi dengan instansi lain

Dalam tabel di atas disebutkan bahwa salah satu permasalahan adalah masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan salah satu akar masalah

yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman. Melihat dari akar masalah, maka peran masyarakat untuk ikut menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban merupakan faktor kunci keberhasilan untuk menurunkan angka gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Sedangkan untuk permasalahan mengerucut pada Penegakan Perda serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masih tingginya pelanggaran Perda/Perkada;
2. Masih tingginya angka kriminalitas, gangguan ketertiban dalam masyarakat, antara lain disebabkan oleh tindak kejahatan, pelanggaran hukum dan keterbatasan petugas serta kesadaran hukum masih rendah;
3. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, antara lain disebabkan masih rendahnya kepedulian masyarakat akan pentingnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut :
 - a. Banyaknya pelanggaran Perda/Perkada dan timbulnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilakukan oleh warga menjadi permasalahan tersendiri dimana sanksi yang diberlakukan tidak menimbulkan efek jera;
 - b. Belum adanya regenerasi linmas sehingga linmas banyak yang sudah berusia lanjut.
 - c. Belum terjangkaunya penanganan gangguan ketentraman dan penegakan Perda di wilayah pedesaan secara keseluruhan;
 - d. Masih kurangnya jumlah PPNS sehingga mempengaruhi penyelidikan
 - e. Potensi kekerasan di masyarakat dengan mengatasnamakan agama/aliran tertentu;
 - f. Masih kurangnya jumlah dan kemampuan anggota Satpol PP;

- g. Belum optimalnya penanganan kebakaran dan kualitas relawan penanganan kebakaran
- h. Masih kurangnya Wilayah Manajemen Kebakaran
- i. Masih kurangnya jumlah dan kualitas SDM Kesekretariatan

1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

1) Sumber Daya Manusia

Sumberdaya Manusia Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 sebanyak 248 orang, yang terdiri atas 37 Orang PNS dan 139 orang PPPK dan 72 orang non ASN. Secara lengkap data ASN Non ASN Satuan Polisi Pamong Prajadan Pemadam Kebakaran diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.4.1.1
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024

NO.	PENGELOMPOKAN		JUMLAH
1	Menurut jenis kelamin		
	▪ laki-laki ASN	:	157 orang.
	▪ Perempuan ASN	:	19 orang.
	▪ laki-laki Non ASN	:	68 orang.
	▪ Perempuan Non ASN	:	4 orang.
2	Menurut Pendidikan terakhir		
	▪ Pasca Sarjana (S 2)	:	3 orang
	▪ Sarjana (S 1)	:	22 orang
	▪ Sarjana Muda /D3	:	0 orang.
	▪ S L T A	:	222 orang
	▪ S L T P	:	- orang
	▪ S D	:	1 orang
3	Menurut Pangkat/golongan		
	▪ Golongan IV	:	6 Orang
	▪ Golongan III	:	27 orang
	▪ Golongan II	:	4 orang
	▪ Golongan I	:	0 orang
	▪ PPPK	:	139 orang
	▪ Non ASN	:	72 orang
4	Menurut Jabatan		
	▪ Eselon II	:	1 orang

J	▪ Eselon III	:	4 orang
u	▪ Eselon IV	:	7 orang
m	▪ Fungsional	:	18 orang
l	▪ S t a f	:	7 orang
a	▪ PPPK	:	139 orang
h	▪ Non ASN	:	72 orang
5	Menurut Status Kepegawaian		
	▪ P N S	:	37 orang
	▪ Calon PNS	:	0 orang
	▪ PPPK	:	139 orang
	▪ Non ASN	:	72 orang

2) Sarana dan Prasarana

Tabel 1.4.2.1
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Tahun 2024

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan (Lengkap/Kurang /Mencukupi)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Cukup
2	Genset	2	Kurang
3	Pompa Sedot	1	Kurang
4	Mobil Station Wagon/ Penumpang	4	Cukup
5	Truck + Attachhment	2	Cukup
6	Pick Up	2	Cukup
7	Sepeda Motor	34	Cukup
8	Mobil Pemadam Kebakaran	11	Cukup
9	Sepeda	4	Kurang
10	Tandu Dorong	1	Cukup
11	Gergaji Mesin Pemotong Beton Sthil Ts420	3	Cukup
12	Peralatan Las Karbit	1	Cukup
13	Mesin Potong Besi Cut Off 7	1	Cukup
14	Selang Tabung Double	1	Cukup
15	Tabung LPG	1	Kurang
16	Reguler Gas Lpg	1	Kurang
17	Pemotong Beton Portable	1	Cukup
18	Bender Las Pemotong	1	Cukup
19	Mata Bender Pemotong Las	4	Cukup
20	Grinding Besi / Baja Slim Body	1	Cukup
21	Tabung Oxygen Las	1	Kurang
22	Regulator Oxygen	1	Kurang
23	Mechanik Tool Set	1	Kurang

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan (Lengkap/Kurang /Mencukupi)
24	Kabel Besar Dan Stop Kontak	1	Kurang
25	Multipro Chaunsaw	1	Kurang
26	Kereta Dorong	1	Cukup
27	Global Positioning System (Gps)	9	Cukup
28	Chainsaw	3	Cukup
29	Gergaji Mesin Potong Kayu Stihl Ms 382	3	Cukup
30	Lemari Penyimpanan	5	Kurang
31	Mesin Absen (Time Recorder), Baik	1	Kurang
32	Lemari Besi	2	Kurang
33	Rak Besi/Metal	1	Kurang
34	Filling Besi/Metal	15	Kurang
35	Brand Kas	1	Kurang
36	Kardek Besi/Metal	1	Cukup
37	Filling Kabinet 4 Laci	5	Kurang
38	Lemari Kayu	2	Kurang
39	Alat Penghancur Kertas	1	Kurang
40	Mesin Absensi	1	Kurang
41	Plang Perda	50	Kurang
42	Rotator Toa	2	Kurang
43	Mesin Pompa Air	1	Kurang
44	Papan /Plang Perda	40	Kurang
45	Meja Rapat	4	Cukup
46	Tempat Tidur Besi/Metal	60	Cukup
47	Meja Resepsion	1	Cukup
48	Meja Kerja 1/2 Biro	40	Cukup
49	Kasur	30	Cukup
50	Kursi Rapat	140	Cukup
51	Kursi Tamu	5	Cukup
52	Meja Komputer	1	Kurang
53	Tenda	2	Cukup
54	Kursi Kerja	40	Kurang
55	Loker	6	Kurang
56	Lemari Es	6	Cukup
57	Ac Split	3	Cukup
58	Ac Unit	11	Kurang
59	Kompor Gas	6	Cukup
60	Tabung Gas	6	Cukup
61	Televisi	5	Cukup
62	Loudspeaker	1	Kurang
63	Sound System	1	Kurang
64	Megaphone	5	Kurang

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan (Lengkap/Kurang /Mencukupi)
65	Ups Cctv	2	Kurang
66	Kamera Drone	1	Cukup
67	Action Cam	5	Cukup
68	Tangga Alumunium	2	Cukup
69	Dispenser	5	Cukup
70	Meja Kursi Tamu	1	Kurang
71	Korden	110	Cukup
72	Cctv	2	Kurang
73	Breathing Apparatus	5	Cukup
74	Masker Fullface	5	Cukup
75	Y Connection	9	Cukup
76	Coupling 1,5"	5	Cukup
77	Coupling 2,5"	5	Cukup
78	Y Conection 1,5"	2	Kurang
79	Pistolgrib 1,5"	1	Kurang
80	Coupling	1	Kurang
81	Selang 1,5"	2	Kurang
82	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Cukup
83	Meja Pejabat Eselon III	4	Cukup
84	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Cukup
85	Meja Pejabat Eselon IV	2	Cukup
86	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	Cukup
87	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	Cukup
88	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	Cukup
89	Kursi Kerja	40	Cukup
90	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat Eselon III	1	Cukup
91	Lemari Arsip Pintu Geser Kaca	6	Kurang
92	Proyektor + Attachment	2	Kurang
93	Handycam	1	Kurang
94	Camera Electronic	1	Kurang
95	Kamera	1	Kurang
96	Lensa Kamera	1	Kurang
97	Telephone (PABX)	1	Kurang
98	Handy Talky	72	Cukup
99	Ht	15	Cukup
100	Faximile	2	Cukup
101	Unit Transcarver/Transmitter Vhf	1	Cukup
102	Unit Transceiver Vhf Portable	2	Cukup
103	Peralatan Pemancar MF/MW Lain-Lain	1	Cukup

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan (Lengkap/Kurang /Mencukupi)
104	Self Supporting Tower	1	Cukup
105	Alat Kesehatan Perawatan Lain-Lain	1	Cukup
106	Alat Kebugaran/Fitness	7	Cukup
107	Alat Gerinda	1	Cukup
108	Personal Komputer	2	Cukup
109	Alat Pemadam Kebakaran	149	Cukup
110	Tali Tambang	1	Kurang
111	Printer	11	Cukup
112	Perlengkapan Huru Hara	10	Cukup
113	P.C Unit/ Komputer Pc	5	Cukup
114	Komputer Pc All In One	3	Kurang
115	Laptop	26	Kurang
116	Note Book	3	Cukup
117	Cpu	1	Cukup
118	Monitor	2	Cukup
119	Scanner	1	Kurang
120	Server	1	Kurang
121	Pengadaan E-Poskamling	5	Cukup
122	Alat Perlindungan Lain-Lain	9	Cukup
123	Helm Standar	25	Cukup
124	Tripod Vertical Rescue	3	Cukup
125	Peralatan Olah Raga Lainnya. Alat Samapta	6	Cukup
126	Alat bantu / GRAB STICK	6	Kurang
127	Hook STICK	6	Kurang
128	Senter Tembus Asap	6	Kurang
129	Senter LID	18	Kurang
130	Pengadaan E-Poskamling	5	Cukup
131	Alat Perlindungan Lain-Lain	9	Cukup
132	Helm Standar	25	Cukup
133	Tripod Vertical Rescue	3	Cukup
134	Peralatan Olah Raga Lainnya. Alat Samapta	6	Cukup
135	Alat bantu / GRAB STICK	6	Kurang
136	Hook STICK	6	Kurang
137	Senter Tembus Asap	6	Kurang

3) Anggaran

Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4.3.1

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
5			BELANJA DAERAH		
5	1		BELANJA OPERASI	26.831.762.855	22.676.071.055
5	1	01	Belanja Pegawai	11.987.501.296	10.689.995.046
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.844.261.559	11.986.076.009
5	2		BELANJA MODAL	241.054.350	3.423.546.150
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	181.054.350	3.029.896.150
5	2	03	Belanja Modal Aset lainnya	0	288.287.500
5	2	06	Belanja Modal Aset lainnya	60.000.000	105.362.500
			Jumlah Belanja	27.072.817.205	26.099.617.205

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi Latar Belakang, Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi, Isu-isu Strategis, Dukungan SDM Sarana Prasarana dan Anggaran, Sistematika Penulisan serta Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi tentang Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja OPD, Strategi dan Arah Kebijakan, Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi tentang Capaian Kinerja Organisasi, Efisiensi Anggaran, Inovasi serta Penghargaan.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi tentang Kesimpulan serta Rekomendasi.

1.6. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023

Berdasar Surat Bupati Kendal Nomor : 000.8.6.3/013/Insp Tanggal 13 Januari 2025 Perihal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Tahun 2023 serta Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Nomor : 000.8.6.3/318/Insp Tanggal 17 Desember 2024 Perihal : Laporan Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Tahun 2023. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian Saran/Rekomendasi yang harus ditindak lanjuti sebagai mana tertuang dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.6.1

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengumpulan data kinerja.	Sebagai tindak lanjut, kami telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengumpulan data kinerja. SOP tersebut telah disusun secara sistematis untuk memastikan keseragaman dalam proses pengumpulan data dan peningkatan akurasi dalam evaluasi kinerja. Bukti dukung penyusunan SOP dapat diakses melalui tautan berikut: https://bit.ly/sop_siecantikpol .
2.	Mengunggah laporan kinerja baik pada website resmi Pemerintah Daerah maupun pada fitur yang telah tersedia di aplikasi E-SAKIP, secara tepat waktu.	Sebagai tindak lanjut, Satpolkar telah mengimplementasikan sistem penyampaian capaian kinerja secara realtime melalui aplikasi internal yang dapat diakses di https://satpolkar.kendalkab.go.id/siecantikpol/ . Data yang terkumpul dalam aplikasi ini akan menjadi dasar dalam pelaporan LKjIP/AKIP, sehingga memastikan ketepatan waktu dalam pelaporan baik melalui aplikasi E-SAKIP Pemda maupun melalui https://esr.menpan.go.id/ .
3.	Melaksanakan reviu dan penyempurnaan penyusunan pohon kinerja yang digunakan sebagai alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang	Tindak lanjut atas saran/rekomendasi terkait pelaksanaan reviu dan penyempurnaan penyusunan pohon kinerja telah dilaksanakan pada 20 Januari 2025, dengan melibatkan seluruh pejabat struktural di lingkungan Satpolkar Kendal. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pohon kinerja

	diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternative solusi baru dalam mencapai kinerja, sebagaimana diatur melalui Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.	dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mengawal struktur logika sebab-akibat, sehingga organisasi mampu menghasilkan outcome yang diinginkan secara lebih terukur dan sistematis. Penyempurnaan pohon kinerja ini juga telah diselaraskan dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi, data dukung hasil pelaksanaan revidu dan penyempurnaan pohon kinerja dapat diakses melalui link berikut: https://bit.ly/ReviuPohonKinerjaSatpolkar
4.	Melaksanakan rapat pengendalian capaian kinerja secara periodik yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah dengan memaparkan hasil kinerja oleh masing-masing penanggung jawab dan mendokumentasikan rapat serta Menyusun notulen rapat sehingga sesuai dengan tahapan target yang telah ditetapkan.	Sebagai tindak lanjut, rapat pengendalian capaian kinerja telah dilaksanakan secara periodik, dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah, dengan pemaparan hasil kinerja oleh masing-masing penanggung jawab. Setiap rapat didokumentasikan dengan baik, termasuk penyusunan notulen sesuai dengan tahapan target yang telah ditetapkan. Sebagai bukti data dukung, dapat diakses melalui tautan berikut: https://bit.ly/rapatpengendalianinternalsatpolkar Dalam pelaksanaannya, kami juga telah memanfaatkan teknologi yang tersedia, dengan memonitor kinerja secara realtime melalui https://satpolkar.kendalkab.go.id/statistik_kinerja. Selain itu, dalam pemaparan

		capaian kinerja, masing-masing penanggung jawab menyampaikan data berdasarkan hasil inputan yang tersedia pada https://satpolkar.kendalkab.go.id/siecantikpol di menu Capaian Indikator Kinerja.
5.	Informasi dalam laporan kinerja agar dikomunikasikan kepada seluruh pegawai sehingga capaian/realisasi dari target indikator yang diperjanjikan, kendala/hambatan yang dihadapi dapat diketahui seluruh pegawai.	Sebagai tindak lanjut, kami telah memastikan bahwa informasi dalam laporan kinerja dapat dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Realisasi capaian kinerja telah termonitor secara realtime melalui https://satpolkar.kendalkab.go.id/statistik_kinerja, yang dapat diakses oleh seluruh pegawai. Selain itu, masing-masing penanggung jawab indikator juga dapat memantau capaian kinerja melalui https://satpolkar.kendalkab.go.id/siecantikpol pada menu Capaian Indikator Kinerja. Untuk memastikan transparansi dan tindak lanjut atas kendala yang dihadapi, kami juga telah melaksanakan rapat evaluasi kinerja bulanan secara berkala, sehingga seluruh pegawai dapat mengetahui capaian, kendala, dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan.
6.	Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SI-EVA sebagai tools untuk memantau capaian kinerja dan memantau kepatuhan pengisiannya sebagai bagian dari proses pengumpulan data dan pengukuran kinerja secara tepat waktu.	Sebagai tindak lanjut, kami telah mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SI-EVA sebagai alat untuk memantau capaian kinerja dan memastikan kepatuhan dalam pengisiannya. Aplikasi ini digunakan sebagai bagian dari proses pengumpulan data dan pengukuran kinerja secara tepat waktu, sehingga memungkinkan evaluasi yang lebih sistematis dan berbasis data. Selain itu, pemantauan capaian kinerja juga didukung oleh aplikasi internal yang

		dapat diakses melalui https://satpolkar.kendalkab.go.id/siecantikpol. Aplikasi ini menyediakan fitur Capaian Indikator Kinerja, yang memungkinkan masing-masing penanggung jawab untuk menginput dan memonitor perkembangan indikator kinerja secara realtime. Melalui sinkronisasi antara SI-EVA dan SieCantikPol, kami memastikan bahwa proses pemantauan dan pelaporan kinerja menjadi lebih akurat, transparan, dan tepat waktu, sehingga dapat mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data.
7.	Memastikan rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ditindaklanjuti dengan Menyusun dan melaksanakan rencana aksi yang disertai dengan data dukung hasil pelaksanaan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan, terutama pada capaian kinerja yang masih rendah.	Sebagai tindak lanjut, kami telah memastikan bahwa rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ditindaklanjuti secara sistematis. Kami telah menyusun dan melaksanakan rencana aksi yang berfokus pada perbaikan capaian kinerja, terutama pada indikator yang masih rendah. Setiap pelaksanaan rencana aksi didukung dengan data hasil implementasi, sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan. Data dukung hasil pelaksanaan ini juga menjadi dasar dalam evaluasi berkala guna memastikan efektivitas langkah-langkah perbaikan yang telah diterapkan. Melalui pendekatan ini, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja dan memastikan bahwa setiap rekomendasi evaluasi dapat memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kendal terpilih periode tahun 2021-2026 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah :

"Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan"

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) Handal, (2) Unggul, (3) Makmur, (4) Berkeadilan. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2021-2026. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pedoman stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. **KENDAL HANDAL** : adalah suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai Pusat Industri dan Pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdayasaing serta berwawasan lingkungan
2. **UNGGUL** : adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta siap menghadapi revolusi industri 4.0
3. **MAKMUR** : adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal

4. **BERKEADILAN** : memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif

Dalam rangka pencapaian visi di atas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (*start up*);
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0;
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan *stakeholder* pembangunan;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mendukung Misi 3, yaitu : **Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif. ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stokeholder pembangunan.**

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 menetapkan tujuan dan sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.1
Tujuan Sasaran Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan keamanan, rasa nyaman, harmonis dan kondusivitas wilayah	1.1	Meningkatnya kualitas penegakan peraturan daerah	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.2	Meningkatnya penanganan kebakaran	Persentase penanganan kebakaran sesuai standar tingkat waktu tanggap (<i>respon time</i>)	97%	97%	100%	100%	100%	100%

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu :

- a. Pencegahan terjadinya konflik sosial melalui peningkatan pemahaman cinta tanah air, pelaksanaan bela negara, peningkatan kerukunan antar umat beragama serta pelaksanaan pemilu yang kondusif,
- b. Meningkatkan kententraman dan ketertiban umum melalui penegakan perda, peningkatan disiplin aparatur, dan peningkatan pelayanan HUMANIS sesuai dengan SPM,
- c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa melalui penataan desa, peningkatan administrasi desa, peningkatan dan pembentukan BUMDES.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal dalam rangka pelaksanaan strategi adalah arah kebijakan pembangunan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 adalah prioritas pembangunan setiap tahun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran disetiap misi. Berikut ini arah kebijakan tahun 2024:

“Kendal Smart City”

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024 di prioritaskan pada **“Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal Smart City”**. Arah kebijakan ini dengan fokus peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan *clean dan Good Governances*, penguatan *Smart City* yang difokuskan pada *Smart Government, Smart Education, Smart Health, Smart Economy* dan *Smart Transportation*. Focus smart transportation adalah pada peningkatan kualitas transportasi masal seperti penyediaan BRT yang menghubungkan antar kecamatan dan feeder yang menghubungkan antar desa, dengan pengelolaan berbasis teknologi informasi.

Tabel 2.2.1

Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

NO.	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatkan keamanan, rasa nyaman, harmonis dan kondusivitas wilayah	1.1	Meningkatnya kualitas penegakan peraturan daerah	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100
		1.2	Meningkatnya penanganan kebakaran	Persentase penanganan kebakaran sesuai standar tingkat waktu tanggap (<i>respon time</i>)	%	100

Tabel 2.2.2

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya kualitas penegakan peraturan daerah	1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban melalui deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban,	1. Pelaksanaan patroli wilayah dan pembentukan kelompok patroli yang menyasar di wilayah kecamatan,

		2. Meningkatkan penegakan peraturan daerah melalui pendekatan non justisi dan pro justisi, 3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas linmas di kabupaten Kendal, 4. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM melalui Diklat, Bintek dan Uji Kompetensi.	2. Meningkatkan penegakan peraturan daerah melalui operasi penegakan Perda dan pemberdayaan PPNS, 3. meningkatnya kualitas dan kuantitas linmas dengan pemberdayaan Satlinmas, 4. Peningkatkan kualitas dan kompetensi SDM dengan fokus pada sertifikasi kompetensi Satpol dan Penyidik PNS.
2.	Meningkatnya penanganan kebakaran	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya yang ada dalam penanggulangan kebakaran, 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana.	1. Meningkatkan pelayanan Pencegahan kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran.

2.3. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil serta pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maka dari itu ditetapkanlah Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.1

Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATGET
1.	Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100 %

2.	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (<i>respon time</i>)	%	100 %
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	72,55

Tabel 2.3.2

Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATGET
1.	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100 %
2.	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (<i>respon time</i>)	%	100 %
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	72,55

Ket : Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

2.4. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Guna pencapaian indikator sasaran dan untuk mendukung pelaksanaan implementasi sistem akuntabilitas kinerja dari proses perencanaan, pengendalian kegiatan sampai ke tahapan pelaporan maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal menggunakan instrumen-instrumen pendukung yaitu :

1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau disingkat SIPD merupakan sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. SIPD berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Sistem ini pula dapat digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah.

SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kendal menggunakan SIPD dalam proses perencanaan, penganggaran serta pelaporan keuangan. Aplikasi SIPD dapat diakses oleh pegawai dengan akses pengguna anggaran / kepala satuan kerja perangkat daerah yang terdiri dari PPTK dan Bendahara Pengeluaran.

2. Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Operasional Kegiatan (SIMPOK)

SIMPOK adalah sebuah sistem informasi berbasis website, yang memudahkan untuk manajemen pengendalian operasional kegiatan pembangunan daerah, dengan tujuan ialah tersedianya informasi pengendalian operasi kegiatan yang cepat, mudah, akurat serta up-to-date. Serta sistem

informasi ini sudah terintegrasi dengan SIRUP-LKPP, SIMDA Keuangan atau dengan MONEV. Sistem ini memberikan fitur pemasukan data realisasi keuangan, Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan yang sudah dilengkapi dengan Peta Spasial (GIS), Laporan POK, dan memberikan fitur eksekutif summary (EIS) dan grafik, serta memberikan fitur pencetakan laporan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Melalui perangkat lunak ini diharapkan tersedia Sistem Informasi Pengendalian yang dapat dioperasikan oleh segenap aparatur di SETDA dan SKPD lain, terkait dengan proses pengendalian pembangunan.

3. Si – EVA

Aplikasi ini adalah suatu sistem pelaporan periodik/berkala per triwulan untuk pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sasaran eselon 2, kinerja program dan kegiatan terhadap pelaksanaan RKPD secara umum dan Rencana Kerja /Renja Perangkat Daerah secara khusus. Seluruh perangkat menginput capaian kinerja sasaran, program kegiatan dalam aplikasi untuk dipantau dan dilaporkan kepada bupati sebagai wujud pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan.

4. E - SAKIP Kabupaten Kendal

E-Sakip adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (eSAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah pada khususnya, dan kinerja Pemerintah Kabupaten Kendal pada umumnya.

Informasi yang dihasilkan dari aplikasi eSAKIP ini menampilkan informasi meliputi beberapa evidence / data dukung terhadap pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi SAKIP yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

E SAKIP dapat diakses oleh semua perangkat daerah melalui admin perangkat / pejabat/ petugas yang mengelola SAKIP dan juga para Evaluator SAKIP untuk melaksanakan evaluasi terhadap Implementasi SAKIP di seluruh perangkat daerah Kabupaten Kendal.

5. E - SAKIP REVIU (ESR)

E - SAKIP REVIU adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Sistem ini bertujuan sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan Akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online. ESR ini secara umum memiliki tujuan seperti E SAKIP Kendal dimana aplikasi ini dapat diakses oleh semua perangkat daerah melalui admin perangkat / pejabat/ petugas yang mengelola SAKIP dan juga para Evaluator SAKIP untuk melaksanakan evaluasi terhadap Implementasi SAKIP di seluruh perangkat daerah Kabupaten Kendal.

6. SieCantikPol

SieCantikPol (Sistem Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Satpolkar) adalah sebuah aplikasi berbasis digital yang

dirancang untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemantauan serta evaluasi capaian indikator kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal. Aplikasi ini dikembangkan sebagai respons terhadap tantangan dalam pengelolaan dan pelaporan kinerja yang sebelumnya masih bersifat manual, yang sering kali menyebabkan ketidakefisienan dalam pencatatan, analisis, serta pengambilan keputusan strategis berbasis data. Dengan adanya SieCantikPol, proses pemantauan kinerja dapat dilakukan secara lebih sistematis, cepat, dan akurat, sehingga memudahkan pimpinan dalam menilai pencapaian target serta merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk peningkatan layanan publik, khususnya dalam bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan penanggulangan kebakaran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang akan dicapai. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2024 ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS),
2. Akuntabilitas Keuangan,
3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- a. Sangat Baik : > 100%
- b. Baik : 85 - 100%
- c. Cukup : 65 - 84,99%
- d. Kurang : 50 - 64,99%
- e. Sangat Kurang : < 50%

Tabel 3.1.1
Capaian Kinerja Tahun 2024

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	PERSENTASE	
1.	Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100%	100%

2.	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (<i>respon time</i>)	%	100	99,21	98,83	100%
3.	Mewujudkan tata kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	Nilai	72,55	73,75	101%	76,55

Tabel 3.1.2
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100%	Baik	Data Capaian Kinerja Satpolkar Tahun 2024
2.	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (<i>respon time</i>)	100	99,21	99,21%	Baik	Data Capaian Kinerja Satpolkar Tahun 2024
3.	Mewujudkan tata kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	72,55	73,75	101%	Sangat Baik	LHE Inspektorat Daerah Kab. Kendal atas AKIP Satpolkar Kendal Nomor : 000.8.6.3/318/Insp Tanggal 17 Desember 2024

Analisis Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran pertama Meningkatkan Kualitas Penegakan Peraturan Daerah yang dievaluasi dapat diuraikan dengan terpenuhinya capaian kinerja Tahun 2024 untuk Indikator Persentase Perda dan

Perkada yang ditegakkan. Apabila dianalisis lebih lanjut disebabkan oleh optimalnya pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada secara rutin dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun berdasarkan jenisnya oleh Satpol PP.

Analisis Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran kedua Meningkatkan Penanganan Kebakaran yang dievaluasi dapat diuraikan, Terpenuhinya capaian kinerja Tahun 2024 untuk Indikator Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (*respon time*) apabila dianalisis lebih lanjut disebabkan oleh optimalnya pelaksanaan penanganan kebakaran sesuai waktu tanggap 15 menit. Secara umum pelaksanaan atas aduan kebakaran 100% tertangani namun untuk pencapaian waktu tanggap tidak dapat mencapai 100% dikarenakan ada 2 (dua) kejadian terkendala yaitu diantaranya adanya lokasi yang terhalang portal serta, namun untuk kategori berdasarkan persentase pencapaiannya tergolong baik.

Analisis Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran ketiga Mewujudkan tata kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik yang dievaluasi dapat diuraikan, Terpenuhinya capaian kinerja Tahun 2024 untuk Indikator Sasaran Nilai SAKIP apabila dianalisis lebih lanjut disebabkan oleh optimalnya pelaporan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam penyusunan laporan tersebut kemudian pada sub komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan pencapaian sasaran rata-rata telah dilaksanakan dengan optimal serta menindaklanjuti saran rekomendasi guna perbaikan kedepan.

Tabel 3.1.3

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (<i>respon time</i>)	97	98,16	101	100	98,83	98,83	100	99,21	99,21
3.	Mewujudkan tata kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	68,55	71,70	104	70,55	73,00	103	72,55	73,75	101%

Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dengan tahun sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 pada indikator Sasaran Strategis ke 1 Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan yang dievaluasi pada capaian kinerja Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022, masih di target predikat penilaian yang sama yaitu tingkat ketercapaian 100% artinya semua Perda yang menjadi kewenangan Satpol PP seluruhnya telah tertangani atas pelanggarannya,

- 2) Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2 pada Indikator ke 2 Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (*respon time*) pada capaian kinerja Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 masih mengalami kenaikan penanganan yaitu meningkat sebesar 0,38% dari tahun 2023 realisasi 98,83% dan Tahun 2024 meningkat ketercapaiannya menjadi 99,21%, terdapat 2 (dua) kasus kebakaran yang tidak tercapai waktu tanggapnya, namun secara keseluruhan laporan atas kejadian kebakaran setiap tahunnya seluruhnya tertangani.
- 3) Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3 pada Indikator ke 1 Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah pada capaian kinerja Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 telah memenuhi target yang ditetapkan karena target yang ditetapkan adalah Predikat Interpretasi Huruf BB capaian pada huruf BB. Begitu juga dengan target realisasi di tahun sebelumnya, hal ini mencerminkan adanya peningkatan tata kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di setiap tahunnya.

Tabel 3.1.4

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	100%	100 %
2.	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (<i>respon time</i>)	99,21%	100%	99,21 %
3.	Mewujudkan tata kelola serta	Nilai SAKIP	(BB)	(BB)	96,34 %

	Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik		73,75	76,55	
--	---	--	-------	-------	--

Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Realisasi kinerja Sasaran Strategis pada indikator Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan yang dievaluasi sampai dengan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal yaitu capaian pada tahun pelaporan 2024 dibandingkan dengan target akhir pada Rencana Strategis Tahun 2026 sudah tercapai di angka 100 %.
- 2) Realisasi kinerja Sasaran Strategis pada indikator Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (*respon time*) sampai dengan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal yaitu capaian pada tahun pelaporan 2024 dibandingkan dengan target akhir pada Rencana Strategis Tahun 2026 sudah tercapai di angka 99,21%.
- 3) Realisasi kinerja Sasaran Strategis pada indikator Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal yaitu capaian pada tahun pelaporan 2024 dibandingkan dengan target akhir pada Rencana Strategis Tahun 2026 sudah tercapai di angka 96,34%.

Tabel 3.1.5
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang
telah dilakukan:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			Analisis Keberhasilan/Keagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian %		
1.	Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	Ketercapaian target dengan jumlah 18 perda/perkada telah tertangani dengan keberadaan 8 Orang PPNS disebabkan intensitas kegiatan selama tahun 2023 dengan penanganan 64 kasus pelanggaran perda/perkada serta 64 laporan yang telah ditindak secara yustisi maupun non yustisi	Konsistensi pengampu kebijakan secara intensif dalam pelaksanaan penegakan pelanggaran perda/perkada
2.	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (<i>respon time</i>)	100	99,21	99,21	Ketercapaian target penanganan kebakaran atas waktu tanggap dengan total 254 kasus kebakaran dan 2 kasus tidak tercapai respon time dimana wilayah kabupaten Kendal terdapat 20 kecamatan hanya ter backup 6 sektor pemadam kebakaran.	Penambahan sektor damkar berikut mobil pemadam kebakaran dan juga penyukupan sarpras yang sesuai standar serta sdm yg ada.
3.	Mewujudkan tata kelola serta Meningkatkan Efektivitas	Nilai SAKIP	72,55	73,75	101	Terdokumentasinya kegiatan yang konsisten guna memudahkan dalam	Konsistensi dalam pelaksanaan evaluasi kinerja.

	Birokrasi dan Pelayanan Publik					pengukuran serta Analisa kinerja	
--	--------------------------------	--	--	--	--	----------------------------------	--

Analisis keberhasilan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dengan peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Realisasi kinerja Sasaran Strategis pada indikator Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan yang Dievaluasi sampai dengan tahun 2024 Analisis Keberhasilan Ketercapaian target dengan jumlah 18 perda/perkada telah tertangani dengan keberadaan 8 Orang PPNS disebabkan intensitas kegiatan selama tahun 2024 rutin dari bulan Januari s.d. Desember dengan penanganan 64 kasus pelanggaran perda/perkada tertangani di sub kegiatan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa serta 75 laporan tertangani di sub kegiatan penanganan atas pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang telah ditindak secara yustisi maupun non yustisi. Solusi yang dilakukan Konsistensi pengampu kebijakan secara intensif dalam pelaksanaan penegakan pelanggaran perda/perkada.
- 2) Realisasi kinerja Sasaran Strategis pada indikator Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (*respon time*) sampai dengan tahun 2024 Analisis Keberhasilan Ketercapaian target penanganan kebakaran atas waktu tanggap dengan total 254 kasus kebakaran dan 2 kasus tidak tercapai respon time dimana wilayah kabupaten Kendal terdapat 20 kecamatan hanya ter backup 6 sektor pemadam, Solusi yang dilakukan

penambahan sektor damkar berikut mobil operasional pemadam kebakaran dan juga penyukupan sarpras yang sesuai standar serta sdm yg ada.

- 3) Realisasi kinerja Sasaran Strategis pada indikator Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 Analisis Keberhasilan Terdokumentasinya kegiatan yang konsisten guna memudahkan dalam pengukuran serta Analisa kinerja Solusi yang dilakukan Konsistensi dalam pelaksanaan evaluasi kinerja.

Tabel 3.1.6

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1.	Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	4.836.479.000,-	3.842.647.919,-	79,45	20,55
2.	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (<i>respon time</i>)	100	99,21	99,21	4.148.472.555,-	3.526.365.960,-	85,00	15

3.	Mewujudkan tata kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	72,55	73,75	101	17.114.665.650,-	12.829.519.520,-	74,96	25,04
----	--	-------------	-------	-------	-----	------------------	------------------	-------	-------

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah adalah sebesar Rp. 4.148.472.555,- atau 79,45% dari total pagu sebesar Rp. 4.836.479.000,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya kurang lebih sebesar 20,55 % dari Pagu yang ditentukan.
- 2) Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Penanganan Kebakaran adalah sebesar Rp. 3.526.365.960,- atau 85 % dari total pagu sebesar Rp. 4.148.472.555,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya kurang lebih sebesar 15 % dari Pagu yang ditentukan.
- 3) Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis Mewujudkan tata kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp. 12.829.519.520,- atau 74,96 % dari total pagu sebesar Rp. 17.114.665.650,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya kurang lebih sebesar 25,04 % dari Pagu yang ditentukan.

Tabel 3.1.7**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunja ng/Tida k Menunja ng
1.	Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Menunjang
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditindaklanjuti	100	Menunjang
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah perda/perkada yang ditertibkan	100	Menunjang
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang dibina	100	Menunjang
2.	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	Prosentase Penangana n Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (respon time)	99,21	Program Pencegaha, Penanggulangan, Peny elamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	99,2 1	Menunjang
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100	Menunjang

				Kabupaten/Kota	kebakara		
				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pesentase peralatan proteksi kebakaran yang terinspeksi	100	Menunjang
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase masyarakat dalam pencegahan kebakaran yang diberdayakan	100	Menunjang
				Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang diselenggarakan	100	Menunjang
3.	Mewujudkan tata kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	101	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dibagi jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai ketentuan yang berlaku di kali seratus	100	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terbayarnya gaji, tunjangan dan honor	100	Menunjang

					pegawai dibagi jumlah bulan terbayarnya gaji, tunjangan dan honor pegawai sesuai ketentuan dikali seratus		
--	--	--	--	--	---	--	--

3.2. Realisasi Anggaran

Tabel 3.2.1

Realisasi Anggaran Yang Digunakan Untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi Sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	4.836.479.000,-	4.148.472.555,-	79,45
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.296.479.000,-	3.842.647.919,-	82,46
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	15.000.000	600.000	4
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.704.479.000	3.477.735.929	93,88
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	12.000.000	9.084.800	75,71
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.000.000	9.200.000	46,00
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	55.000.000	0	0
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	90.000.000	32.300.000	35,89
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	80.000.000	13.800.000	17,25

	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	20.000.000	0	0
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	300.000.000	0	0
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	535.000.000	299.927.190	56,06
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	500.000.000	288.977.190	57,80
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	35.000.000	10.950.000	31,29
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	5.000.0000	0	0
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	5.000.0000	0	0
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	4.148.472.555	3.526.365.960	85,00
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.880.840	2.517.889.200	87,40
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.583.040.000	1.570.063.500	99,18
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	180.000.000	72.311.000	40,17
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	30.000.000	1.500.000	5,00
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	85.000.000	72.517.050	85,31
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	985.300.000	800.747.650	81,27
	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	17.500.000	750.000	4,29
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	17.000.000	3.408.400	20,05
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	17.000.000	3.408.400	20,05
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.091.632.555	918.674.300	99
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	1.069.632.555	902.321.800	99

	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	22.000.000	16.352.500	74,33
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	159.000.000	86.394.060	54,34
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	139.000.000	72.041.560	51,83
	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	20.000.000	14.352.500	71,76
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.114.666.650	12.829.519.520	74,96
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.000.000	26.560.300	56,51
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	10.801.300	72,01
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	1.318.400	26,37
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	3.566.400	71,33
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	1.108.000	22,16
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.000.000	2.105.600	42,11
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.000.000	7.660.600	63,84
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.745.282.546	10.155.491.515	94,51
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.683.282.546	10.102.510.044	94,56
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.0000	3.574.900	71,50
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	57.000.000	49.406.571	86,68
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	483.000.000	264.750.000	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.000.000	6.600.000	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000	20.725.000	100
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	275.000.000	237.425.000	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.226.627.000	1.308.344.950	58,76
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000	29.476.000	84,22
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	128.000.000	25.000.000	19,53
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	1.465.0000	7,23

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	91.268.000	91,26
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	84.592.300	84,59
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.733.627.000	990.235.600	57,12
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	110.000.000	86.308.050	78,46
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.832.738.000	0	0
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.832.738.000	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	541.700.000	444.507.486	82,06
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	4.700.000	94,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	313.000.000	233.939.849	74,74
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000	73.146.214	91,43
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	143.700.000	132.721.423	92,36
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.238.318.104	629.865.269	50,86
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	900.000.000	462.072.270	51,34
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	25.882.000	51,76
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	288.138.104	141.910.999	49,22

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 penyerapan anggaran per Sub Kegiatan sangat bervariasi dari yang prosentase serapan keuangan tertinggi yaitu di beberapa Sub Kegiatan dengan serapan di atas 90% dan untuk serapan terendah yaitu di Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada sebesar 0%.

Secara keseluruhan pada Tahun Anggaran 2024 terdapat efisiensi anggaran dilihat dari sisi penyerapan anggaran sebesar Rp. 20.198.533.399,- atau 77,39 % dibandingkan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 26.099.617.205,-

Sehingga Tahun 2024 terdapat efisiensi Rp. 5.901.083.086,- atau 22,61%.

3.3. Inovasi

Proyek Perubahan (Inovasi) yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun 2024 diantaranya:

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi melalui Sistem Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Satpol PP dan Damkar (*SieCantikPol*) di Kabupaten Kendal.

Aksi perubahan ini bertujuan untuk terbangunnya sistem evaluasi dan pelaporan berbasis teknologi informasi dalam peningkatan kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal yang dapat dimonitor oleh stakeholder dengan mudah setiap saat (*real time*) dan efektif dalam mencapai target capaian.

Adapun target capaian tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) capaian, yaitu capaian jangka pendek, capaian jangka menengah dan capaian jangka panjang. Yaitu :

a. Tujuan Jangka Pendek :

- 1) Menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi seluruh unit kerja/Tim terkait penyusunan dan penyajian laporan perkembangan kegiatan, laporan bulanan, dan laporan target realisasi pelaksanaan kegiatan.
- 2) Mengidentifikasi kebutuhan dan melakukan pengadaan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang diperlukan untuk membangun sistem evaluasi dan pelaporan berbasis teknologi informasi.

- 3) Membangun sistem evaluasi dan pelaporan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi antara seluruh unit kerja.
- b. Tujuan Jangka Menengah :
- 1) Meningkatkan koordinasi dan peran aktif antar unit kerja dalam penyusunan dan penyajian laporan melalui sistem evaluasi dan pelaporan yang terbangun.
 - 2) Mengoptimalkan pemanfaatan sistem evaluasi dan pelaporan berbasis teknologi informasi untuk mempercepat proses penyusunan dan penyajian laporan.
 - 3) Melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem evaluasi dan pelaporan berbasis teknologi informasi secara berkala untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
 - 4) Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penggunaan dan pemanfaatan sistem evaluasi dan pelaporan berbasis teknologi informasi.
- c. Tujuan Jangka Panjang :
- 1) Memastikan sistem evaluasi dan pelaporan berbasis teknologi informasi berjalan dengan baik dan menjadi budaya kerja dalam organisasi.
 - 2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi melalui penyajian laporan yang tepat waktu dan dapat diakses oleh stakeholder secara real-time.
 - 3) Mencapai target capaian kinerja organisasi secara efektif dan efisien dengan didukung oleh sistem evaluasi dan pelaporan yang andal dan terintegrasi.

- 4) Menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal sebagai role model dalam penerapan sistem evaluasi dan pelaporan berbasis teknologi informasi bagi organisasi lainnya.
2. Optimalisasi Pelayanan Penanggulangan Kebakaran Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Sistem Informasi di Kabupaten Kendal.

Proyek Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sistem informasi penanggulangan kebakaran dengan membentuk Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) dan pengembangan sistem informasi aplikasi berbasis android di Kabupaten Kendal.

Adapun tujuan akan dicapai dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- a. Tujuan Jangka Pendek

Terwujudnya sinergi/kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dan pemerintah desa dalam pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) dan pelatihan dalam rangka pencegahan, antisipasi, kesiapsiagaan terhadap bahaya kebakaran dan persiapan pengembangan system informasi berbasis android.

- b. Tujuan Jangka Menengah

Terwujudnya pelayanan masyarakat berbasis android dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang terintegrasi menjadi sebuah sistem untuk memaksimalkan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Kendal dan terwujudnya kebijakan untuk penganggaran kegiatan di tingkat desa terkait pencegahan kebakaran bersumber dari dana desa.

c. Tujuan Jangka Panjang

Terwujudnya penambahan sarana mobilitas operasional dan prasarana pemadam kebakaran di Kabupaten Kendal.

Manfaat proyek perubahan ini dapat dirasakan oleh beberapa stakeholder diantaranya Pemerintah Kabupaten Kendal, *Private Sector*, Akademisi dan Masyarakat yaitu Terciptanya kesiapsiagaan dan antisipasi terhadap bahaya kebakaran di lingkungan masyarakat, dan memudahkan masyarakat dalam melaporkan dan mempercepat pelayanan pemadaman dan penyelamatan, Kemudahan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan damkar dan masyarakat memperoleh pelayanan damkar yang responsif, cepat dan tepat.

BAB IV

P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas mengupayakan secara maksimal perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan keteriban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana keamanan dan ketertiban, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah sesuai dengan rasa keadilan dan dinamika masyarakat serta pengembangan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan HAM.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal selama Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Indikator Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah pada capaian kinerja Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 telah memenuhi target yang ditetapkan karena target yang ditetapkan adalah Predikat Interpretasi Huruf BB (72,55) capaian pada huruf BB (73,75) atau prosentase sebesar 101%.

- 2) Capaian kinerja Sasaran Strategis pada indikator Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan yang Dievaluasi pada capaian kinerja Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022, masih di target predikat penilaian yang sama yaitu tingkat ketercapaian 100% artinya semua Perda yang menjadi kewenangan Satpol PP seluruhnya telah tertangani atas pelanggarannya,
- 3) Realisasi kinerja Sasaran Strategis pada indikator Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (*respon time*) sampai dengan tahun 2024 Analisis Keberhasilan Ketercapaian target penanganan kebakaran atas waktu tanggap dengan total 254 kasus kebakaran dan 2 kasus tidak tercapai respon time dimana wilayah kabupaten Kendal terdapat 20 kecamatan hanya ter backup 6 sektor pemadam, Solusi yang dilakukan Penambahan sector damkar serta mobil operasional pemadam kebakaran dan juga penyukupan sarpras yang sesuai standar serta sdm yg ada
- 4) Realisasi efisiensi anggaran dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2024 terdapat efisiensi anggaran dilihat dari sisi penyerapan anggaran sebesar Rp. 20.198.533.399,- atau 77,39 % dibandingkan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 26.099.617.205,- Sehingga Tahun 2023 terdapat efisiensi Rp. 5.901.083.086,- atau 22,61%.

4.2. REKOMENDASI

Rekomendasi Atas Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah :

- 1) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengumpulan data kinerja, Sebagai tindak lanjut, kami telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)

tentang pengumpulan data kinerja. SOP tersebut telah disusun secara sistematis untuk memastikan keseragaman dalam proses pengumpulan data dan peningkatan akurasi dalam evaluasi kinerja. Bukti dukung penyusunan SOP dapat diakses melalui tautan berikut: https://bit.ly/sop_siecantikpol.

- 2) Mengunggah laporan kinerja baik pada website resmi Pemerintah Daerah maupun pada fitur yang telah tersedia di aplikasi E-SAKIP, secara tepat waktu, Sebagai tindak lanjut, Satpolkar telah mengimplementasikan sistem penyampaian capaian kinerja secara realtime melalui aplikasi internal yang dapat diakses di <https://satpolkar.kendalkab.go.id/siecantikpol/>. Data yang terkumpul dalam aplikasi ini akan menjadi dasar dalam pelaporan LKjIP/AKIP, sehingga memastikan ketepatan waktu dalam pelaporan baik melalui aplikasi E-SAKIP Pemda maupun melalui <https://esr.menpan.go.id/>.
- 3) Melaksanakan reviu dan penyempurnaan penyusunan pohon kinerja yang digunakan sebagai alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternative solusi baru dalam mencapai kinerja, sebagaimana diatur melalui Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, Tindak lanjut atas saran/rekomendasi terkait pelaksanaan reviu dan penyempurnaan penyusunan pohon kinerja telah

dilaksanakan pada 20 Januari 2025, dengan melibatkan seluruh pejabat struktural di lingkungan Satpolkar Kendal. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pohon kinerja dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mengawal struktur logika sebab-akibat, sehingga organisasi mampu menghasilkan outcome yang diinginkan secara lebih terukur dan sistematis. Penyempurnaan pohon kinerja ini juga telah diselaraskan dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi, data dukung hasil pelaksanaan reuiu dan penyempurnaan pohon kinerja dapat diakses melalui link berikut: <https://bit.ly/ReuiuPohonKinerjaSatpolkar>.

- 4) Melaksanakan rapat pengendalian capaian kinerja secara periodik yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah dengan memaparkan hasil kinerja oleh masing-masing penanggung jawab dan mendokumentasikan rapat serta Menyusun notulen rapat sehingga sesuai dengan tahapan target yang telah ditetapkan. Sebagai tindak lanjut, rapat pengendalian capaian kinerja telah dilaksanakan secara periodik, dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah, dengan pemaparan hasil kinerja oleh masing-masing penanggung jawab. Setiap rapat didokumentasikan dengan baik, termasuk penyusunan notulen sesuai dengan tahapan target yang telah ditetapkan.

Sebagai bukti data dukung, dapat diakses melalui tautan berikut: <https://bit.ly/rapatpengendalianinternalsatpolkar>

Dalam pelaksanaannya, kami juga telah memanfaatkan teknologi yang tersedia, dengan memonitor kinerja secara realtime melalui

https://satpolkar.kendalkab.go.id/statistik_kinerja. Selain itu, dalam pemaparan capaian kinerja, masing-masing penanggung jawab menyampaikan data berdasarkan hasil inputan yang tersedia pada <https://satpolkar.kendalkab.go.id/siecantikpol> di menu Capaian Indikator Kinerja.

- 5) Informasi dalam laporan kinerja agar dikomunikasikan kepada seluruh pegawai sehingga capaian/realisasi dari target indikator yang diperjanjikan, kendala/hambatan yang dihadapi dapat diketahui seluruh pegawai. Sebagai tindak lanjut, kami telah memastikan bahwa informasi dalam laporan kinerja dapat dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Realisasi capaian kinerja telah termonitor secara realtime melalui https://satpolkar.kendalkab.go.id/statistik_kinerja, yang dapat diakses oleh seluruh pegawai. Selain itu, masing-masing penanggung jawab indikator juga dapat memantau capaian kinerja melalui <https://satpolkar.kendalkab.go.id/siecantikpol> pada menu Capaian Indikator Kinerja.

Untuk memastikan transparansi dan tindak lanjut atas kendala yang dihadapi, kami juga telah melaksanakan rapat evaluasi kinerja bulanan secara berkala, sehingga seluruh pegawai dapat mengetahui capaian, kendala, dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan.

- 6) Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SI-EVA sebagai tools untuk memantau capaian kinerja dan memantau kepatuhan pengisiannya sebagai bagian dari proses pengumpulan data dan pengukuran kinerja secara tepat waktu. Sebagai tindak lanjut, kami telah mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SI-EVA sebagai alat untuk memantau

capaian kinerja dan memastikan kepatuhan dalam pengisiannya. Aplikasi ini digunakan sebagai bagian dari proses pengumpulan data dan pengukuran kinerja secara tepat waktu, sehingga memungkinkan evaluasi yang lebih sistematis dan berbasis data.

Selain itu, pemantauan capaian kinerja juga didukung oleh aplikasi internal yang dapat diakses melalui <https://satpolkar.kendakab.go.id/siecantikpol>. Aplikasi ini menyediakan fitur Capaian Indikator Kinerja, yang memungkinkan masing-masing penanggung jawab untuk menginput dan memonitor perkembangan indikator kinerja secara realtime.

Melalui sinkronisasi antara SI-EVA dan SieCantikPol, kami memastikan bahwa proses pemantauan dan pelaporan kinerja menjadi lebih akurat, transparan, dan tepat waktu, sehingga dapat mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data

- 7) Memastikan rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ditindaklanjuti dengan Menyusun dan melaksanakan rencana aksi yang disertai dengan data dukung hasil pelaksanaan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan, terutama pada capaian kinerja yang masih rendah. Sebagai tindak lanjut, kami telah memastikan bahwa rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ditindaklanjuti secara sistematis. Kami telah menyusun dan melaksanakan rencana aksi yang berfokus pada perbaikan capaian kinerja, terutama pada indikator yang masih rendah.

Setiap pelaksanaan rencana aksi didukung dengan data hasil implementasi, sehingga dapat digunakan sebagai

umpan balik untuk perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan. Data dukung hasil pelaksanaan ini juga menjadi dasar dalam evaluasi berkala guna memastikan efektivitas langkah-langkah perbaikan yang telah diterapkan.

Melalui pendekatan ini, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja dan memastikan bahwa setiap rekomendasi evaluasi dapat memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Kendal, Januari 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kendal



Drs. BAMBANG DJOKO PITONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19690323 199003 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. BAMBANG DJOKO PITONO

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kendal

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DICO M GANINDUTO, B.Sc., M.Sos.

Jabatan : Bupati Kendal

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendal, Oktober 2024



Pihak Kedua,

DICO M GANINDUTO, B.Sc., M.Sos.



Pihak Pertama,

Drs. BAMBANG DJOKO PITONO
NIP. 19690323 199003 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KENDAL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	100 %
2.	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (<i>respon time</i>)	100 %
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	72,55

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.114.665.650	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
2.	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	4.836.479.000	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, Dana Alokasi Umum
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.148.472.555	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
J U M L A H		26.099.617.205	

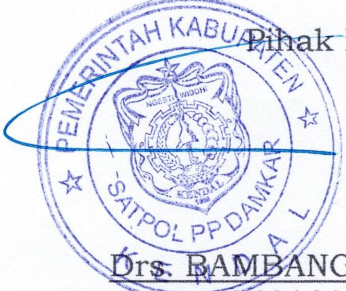
Kendal, Oktober 2024

Pihak Kedua,



DICO M. GANINDUTO, B.Sc., M.Sos.

Pihak Pertama,



Drs. RAMBANG DJOKO PITONO
NIP. 19690323 199003 1 008

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2024
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KENDAL

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET				
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4							
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10												11				
	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	25%	25%	25%	25%	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi																						
						Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	8 Dokumen	pendataan sarpras dan penggantian suku cadang dan servis berkala unit sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Rp 139.000.000	Kepala Bidang Kebakaran																	
						Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	2 Laporan	adanya aparatur yang tersertifikasi penyelamatan	Rp 20.000.000	Kepala Bidang Kebakaran																	
										Rp 26.099.617.205																		

Kendal, Oktober 2024.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal



Drs. BAMBANG DJOKO PITONO
NIP. 19690323 199003 1 008

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	74,55
2	Meningkatnya kualitas penegakan peraturan daerah dan penanganan kebakaran	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	100
3	Meningkatnya penanganan kebakaran	Presentase penanganan kebakaran sesuai standar tingkat waktu tanggap (<i>respon time</i>)	100



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kendal

Dis. BAMBANG DJOKO PITONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19690323 199003 1 008